

Hutan Kami Hidup Kita

Cerita dari Muara Tae

Our Forest Our Lives

The Story from Muara Tae



Pengantar

Permasalahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat, perusahaan tambang dengan masyarakat adat, perusahaan HTI dengan masyarakat adat dan HPH dengan masyarakat adat menjadi permasalahan yang belum dalam diselesaikan di Indonesia.

Ekspansi batubara dan sawit telah menjalar ke desa Muara Tae yang terletak di Kabupaten Kutai Barat. Ekspansi tersebut dilakukan dengan alasan pemenuhan kebutuhan energi nasional. Namun, argumen itu kontradiktif dengan kenyataan bahwa lebih dari separuh batubara dan sawit mentah diekspor ke luar negeri dikarenakan harga yang lebih menarik. Sekitar 73.8 persen produksi sawit mentah (crude palm oil) ternyata di ekspor ke luar negeri pada 2009. Di Kutai Barat, peningkatan produksi batubara telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 2007 sampai 2009. 70 persen produksi batubara nasional pun di keruk dari Kalimantan Timur. Namun, 80% dari produksi nasional batubara diekspor ke luar negeri pada 2010.

Kedatangan korporasi tambang batubara dan sawit juga tidak membawa dampak pemenuhan kebutuhan energi listrik dan kesejahteraan signifikan bagi masyarakat Muara Tae. Batubara merupakan salah satu bahan baku untuk energi listrik. Walaupun salah satu korporasi besar pemasok batubara paling banyak masuk ke Muara Tae, yakni PT Gunung Bayan Pratama coal, kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu kabupaten terendah dalam hal pemenuhan listrik di Kalimantan timur. Di Kalimantan timur, PLN (Perusahaan Listrik Negara) juga dikabarkan pernah defisit sebanyak 30 MW. Ironisnya, lebih 50 persen penjualan listrik nasional masih untuk gabungan industri dan komersial. Dari sisi kesejahteraan, walaupun Kabupaten Kutai Barat merupakan peringkat 18 kabupaten tertinggi nasional dalam penerimaan dana bagi hasil pajak ataupun bukan pajak, hingga 740 milyar rupiah, namun IPM (Indeks pembangunan manusia) Kutai Barat menempati 5 peringkat terbawah di Kalimantan timur.

Telapak menemukan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Kampung Muara Tae mendapatkan

Introduction

The problem between palm oil plantations company with indigenous people, mining company with indigenous people, Forest Plantations (HTI) with indigineoud people and logging concessions (HPH) with indigenous people are become an issues that has not been resolved in Indonesia.

The expansion of coal mining and palm oil plantation until to Muara Tae Village in Kutai Barat District, East Kalimantan. The expansion is done for reasons of national energy needs. However, the argument was contradicted by the fact that more than hlf of local and crude palm oil exported to foreign countries because the price more attractive. Arround 73.8 percent of crude palm oil production turned out to be exported to foreign countries in 2009. In Kutai Barat, the increased of coal production has increased more than 2-fold from 2007 to 2009. The 70 percent of nasional coal production are from East Kalimantan. But, the 80 percent of nasional coal production exporte to foreign countries in 2010.

The arrival of coal mining and palm oil also do not carry the impact of electric energy needs and the significant of welfare to the communities in Muara Tae. Coal is one of the raw materials of electrical energy. Although one of the big corporations and the most of coal supplier into Muara Tae, PT Gunung Bayan Pratama Coal, the Kutai Barat district become ont of the lowest disctrict for electricity procurement in East Kalimantan. In East Kalimantan, PLN (State Electricity Company) is also rumoared to have a deficit of 30 MW. Ironically, over 50 percent of national electricity sales are for the industrial and commercial. In terms of welfare, although the Kutai Barat District is the highest national ranking of 18 districts in receipt of tax-sharing fund or non-tax, up to 740 billion rupiah, but the HDI (human development index) of Kutai Barat District occupies the 5 ranked lowest in East Kalimantan.

Telapak reveals that companies who oparate around Muara Tae Village got money from Government Pension Fund Global of Noway. It means that Norway- the inisiator of REDD+ in Indonesia- had invested their money to a company that has evicted the land owned by indigenous people.

uang dari dana pensiun Norwegia atau Government Pension Fund Global. Itu artinya, Norwegia negara yang disebut sebagai pencetus REDD+ di Indonesia ikut mendanai perusahaan-perusahaan yang menggusur kawasan masyarakat adat

Kehadiran korporasi sawit dan tambang hanya menambah konflik suram di Muara tae. Masyarakat lokal dipaksa untuk memperjuangkan hak tanah untuk tidak diambil demi kepentingan komersialisasi korporasi besar.

Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah strategis untuk permasalahan yang terjadi di Muara Tae, karena permasalahan yang terjadi dilapangan tidak hanya diantara perusahaan dengan masyarakat adat, tapi juga hingga menimbulkan konflik horisontal diantara warga Dayak Benuaq. Pemerintah Norwegia juga harus mengambil langkah aksi, dengan mencabut investasinya di setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang menyebabkan aktivitas deforestasi dan konflik dengan masyarakat adat.

Telapak,
November 2011

The presence of palm oil company and coal mining company only adds to the conflict in Muara Tae. Local Communities are forced to fight for the land rights to not be taken for the commercialization interest by large corporations.

The Government of Indonesia must take an action for case in Muara Tae, because the problems occurred in the field not only among company with indigenous peoples, but also to cause the horizontal conflict among the Dayak Benuaq people. The government of Norway also need to take an action, to rovoke they investment to every company operated in Indonesia where the activities company causing deforestation and conflict with indegenous peoples.

Telapak,
November 2011



Kampung Muara Tae

Kampung Muara Tae adalah sebuah kampung yang berlokasi di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Warga Kampung Muara Tae sangat beragam, terdiri dari warga asli (Dayak Benuaq ada sekitar 30%) dan warga pendatang (Toraja, Batak dan Jawa sekitar 70%).

Kekayaan alam Kecamatan Jempang telah diambil sejak tahun 1971, dengan beroperasinya perusahaan HPH, PT Sumber Mas (yang dimiliki oleh seorang pengusaha, Josh Sutomo). PT Sumber Mas beroperasi di Kecamatan Jempang pada periode 1971-1975, 1983-1985, 1991-1992. Selain perusahaan HPH, PT Sumber Mas juga membangun HTI di Kecamatan Jempang pada awal 1993, dengan PT Dirgarimba sebagai kontraktor pembibitannya. Pada 1995, perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT London Sumatra Group (terkenal dengan nama Lonsum. Pada tahun 2008, Salim Grup membeli London Sumatra Group dan PT Lonsum masih beroperasi hingga sekarang. Pada 1996/1997, masuk perusahaan tambang batubara, PT Gunung Bayan Pratama Coal (dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia, Low Tuck Kwong) yang memulai eksplorasi dan eksploitasi hingga sekarang. Pada 2010, masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Borneo Surya Mining Jaya (Surya Dumai Grup (Keluarga Fangiono)) dan beroperasi hingga sekarang. Pada Oktober 2011, masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya, PT Munte Waniq Jaya Perkasa (TSH Resources Bhd Grup) dan beroperasi hingga hari ini.

Kehadiran perusahaan yang mengelilingi Kampung Muara Tae, tidak lebih baik daripada “perampok” yang hanya mengeruk sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di Muara Tae. Kondisi masyarakat dulu lebih baik dari kondisi saat ini karena kemudahan mencari sumber penghidupan. Rotan, kayu, babi hutan, ikan, madu tanyut, sungai dan lainnya digunakan untuk pemenuhan kehidupan. Masyarakat juga melakukan pola bertani dan berkebun melalui proses penebangan, pembakaran, penanaman, dan pemanenan. Kehadiran perusahaan membawa berbagai masalah selain pengurangan sumber daya alam dan konflik sosial.

Kampung Muara Tae

Muara Tae is the name of a village located in the Jempang sub-district, Kutai Barat, East Kalimantan Province. The villagers are very diverse, which is native (Dayak Benuaq 30%) and migrants (Toraja, Batak and Javanese for 70%).

Natural resource of Jempang had been taken since 1971, with the operation of the logging concessions, PT Sumber Mas (owned by businessman Josh Sutomo). PT Sumber Mas operating in the Jempang sub-district in the period 1971-1975, 1983-1985, 1991-1992. Besides logging concessions, PT Sumber Mas also establish forest plantations in Jempang that began in 1993, with PT Dirgarimba as contractor nursery. In 1995, enter palm oil plantations of PT London Sumatra Group (famous with name Lonsum). In 2008, Salim Group acquired London Sumatera Group and PT Lonsum still operated until now. In 1996/1997, enter coal mining PT Gunung Bayan Pratama Coal (owned by one of the richest in Indonesia, Low Tuck Kwong) which began exploration and exploitation until now. In 2010, enter palm oil plantations of PT Borneo Surya Mining Jaya (Surya Dumai Group (Family Fangiono)) and operated until now. In October 2011, enter other palm oil plantations, PT Munte Waniq Jaya Perkasa (TSH Resources Bhd Group) and operated until today.

The presence of company which are surround Muara Tae, no better than ‘robber’ is only dredge the natural resources without considering the real conditions of community in Muara Tae. Community conditions is better than the present situation, due to the ease of livelihood. Rattan, wood, boar, fish, honey tanyut, river and others used as fulfillment. The community also applies the pattern as farming and gardening is through with cutting, burning, planting, picking / harvesting. Company’s presence has brought various problems beside reduces of natural resources and social conflict.



Kasus London Sumatra

Pada tahun 2000, Telapak mengeluarkan laporan “Menanam Bencana” yang mengekspos bagaimana London Sumatera Grup, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, sebagai contoh yang sangat jelas proses penurunan ekologi, budaya dan sosial karena keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jempang, Muara Pahu, dan Kecamatan Bongan.

Ketenangan hidup masyarakat di Kecamatan Jempang, Muara Pahu dan Kecamatan Bongan mulai terusik pada awal 1995. Ketika itu, orang-orang Lonsum, sejumlah pejabat pemerintah dan aparat keamanan diantaranya Kasospol, Danramil dan Kapolsek Jempang datang dan memberitahu masyarakat bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Tingkat II Kutai Nomor 33/PKT/BPN-16.3/UM-33/XI-1995, wilayah dimana mereka hidup telah ditetapkan sebagai perkebunan kelapa sawit seluas 18.000 hektar.

Masyarakat tidak menerima keputusan pemerintah daerah ini, bahkan dalam pertemuan antar masyarakat menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat menolak perkebunan kelapa sawit di tanahnya. Lonsum, kemudian “membebaskan” lahan masyarakat dengan berbekal peraturan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai No. 083/1993 mengenai pemberian ganti rugi bagi tanaman dan tumbuhan. Pelaksanaan ganti rugi dilakukan dengan cara khas Orde Baru, yaitu dengan melibatkan personel dari Polsek dan Koramil sebagai anggota tim ganti rugi.

London Sumatra case

In 2000, Telapak has released a report “Planting Disaster” which expose how London Sumatra Group, one of the palm oil plantations, is very obvious example of the ecological, cultural and social degradation due to the existence of the palm oil plantations in Jempang sub-district, Muara Pahu and Bongan sub-district.

The peaceful life of the Jempang community, Muara Pahu and Bongan, started to decline in the beginning of 1995, when Lonsum officials, accompanied by some local officers and state security apparatus e.g. Staff Chief of Social and Politics (Kasospol), Military sub-district Commander (Danramil), and Sub-district Police Chief (Kapolsek) of Jempang sub-district informed the community that, according to Decree of National Land Agency of Kutai District No.33/PKT/BPN-16.3/UM-33/XI-1995, the area where they live has been allocated to a 18,000 hectare oil palm development.

The community did not accept the decree, and in a local community meeting, strongly rejected the oil palm plantation scheme on their lands. The Lonsum “took over” community’s lands with used of The Kutai District Regional Government No. 083/1993 in hand to deal with the compensation of the removed plantations. The compensation process was done in the typical ‘New Order way’, which involved local military officers.

The community, who formerly sent a written rejection of the scheme, was intimidated by state apparatuses,

Masyarakat yang di masa-masa awal masuknya Lonsum menolak lewat surat ditanggapi dengan berbagai modus tekanan dan intimidasi dari aparat pemerintah, sehingga akhirnya menunjukkan resistensi dengan menduduki base camp PT Lonsum Internasional. Puncak protes sejumlah warga terjadi ketika Lonsum membulldozer tanaman di lahan milik keturunan Karbaniiq dan menggantinya dengan kelapa sawit. Mereka menghubungi Camat Jempang 6 kali, dan manajer Lonsum sebanyak 8 kali sebelum memutuskan untuk menduduki base camp PT London Sumatera untuk membicarakan ganti rugi atas hak mereka, namun tidak mendapatkan hasil.

Ketika sekelompok masyarakat menduduki base camp PT Lonsum Internasional misalnya, maka segera dikirim sejumlah aparat polsek dan brimob untuk melakukan penjagaan. Di pihak lain walaupun dalam catatan Camat Jempang yang baru A. Wahab Syahrani, Lonsum telah banyak melakukan pelanggaran, diantaranya meratakan tanah-tanah yang sebelumnya telah disetujui untuk di-enclave dan membulldozer tanah-tanah yang belum 'dibebaskan', mereka tidak mendapatkan teguran apalagi sangsi hukum apapun.

Sebaliknya ketika masyarakat meratakan base camp Lonsum melalui pembakaran ditangkap dengan tuduhan melakukan pencurian, kerusakan dan berbagai tindakan anarkis yang melanggar hukum sehingga dinyatakan sebagai kriminal. Sebanyak sembilan orang suku Dayak Benuaq keturunan Karbaniiq ditahan, divonis bersalah dan dipenjarakan hingga 6 bulan karena terlibat dalam pendudukan dan pembakaran base camp Lonsum ini. Masyarakat lokal lainnya dari Kampung Muara Tae, Petrus Asuys, yang melakukan protes menolak kehadiran Lonsum juga mendapat intimidasi dan menjadi target Brimob, sehingga Petrus Asuy menghilang ke dalam hutan selama 3 bulan.

Masyarakat yang protest terhadap pengusuran yang dilakukan oleh Lonsum memang tidak memiliki sertifikat bukti kepemilikan tanah, akan tetapi demikian pula Lonsum juga belum mengantungi HGU maupun IPKH.

Profil London Sumatra Grup

Lonsum adalah singkatan dari Perusahaan Perkebunan PT London Sumatra Indonesia, Tbk. Perusahaan yang

and finally expressed their opposition to the scheme by occupying the Lonsum base camp. Community anger came to peak when Lonsum bulldozed land belonging to Karbaniiq descendents and converted it into palm oil plantations. They tried to contact the sub-district leader 6 times and the Lonsum manager 8 times before deciding to occupy the Lonsum base camp to discuss the compensation for their land, but it ended in vain.

When the community occupied the Lonsum base camp, sub-district police and mobile brigades were directly sent to secure the site. On the other hand, although the new sub-district chief of Jempang (Mr. A. Wahan Syahrani) recorded a lot of violation done by Lonsum, such as leveling off lands that were previously agreed to be an enclave, and bulldozing the lands that were not 'taken over', they did not get any warning or punishment.

On the contrary, people who burnt down the Lonsum base camp were taken under arrest on charge of stealing, destroying and other law-breaking anarchy, and then declared guilty. Nine Dayak Benuaq of Karbaniiq were taken under arrest and imprisoned for 6 months because they were involved in the occupations and the burning down of the Lonsum base camp. Other local people from Muara Tae village (Mr. Petrus Asuy) who do protest against the presence of Lonsum also got intimidation and become target of mobile brigades, so he fled in to the forest up to 3 months.

The community, who protested the removal by Lonsum, did not have any land-ownership certificates at all, but Lonsum itself did not yet get either the Land Use Right (HGU) or the permit for releasing forest area (IPKH).

Profile of London Sumatra Group

Lonsum is abbreviation from company plantation PT London Sumatra Indonesia, Tbk. This company operate for palm oil plantations was incorporated on 1906, and the first shareholder owned by Harrisons and Crosfield from England. Lonsum had operated in Muara Tae village since 1995. The main business of Lonsum not only palm oil, but also develop rubber, chocolate, coffee, and tea.

bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit ini didirikan pada 1906 dan pertama kali dimiliki oleh *Harrisons and Crosfield* dari Inggris. Perusahaan ini beroperasi di Kampung Muara Tae sejak awal tahun 1995. Usaha perkebunan terkemuka tersebut tidak hanya perkebunan kelapa sawit, namun juga karet, coklat, kopi dan teh.

Pada tahun 2008, Lonsum dimiliki oleh Salim Grup atau Indofood Grup melalui PT Salim Ivomas dengan akumulasi kepemilikan saham secara langsung ataupun melalui perantara Credit Suisse Singapura mencapai hingga 57,12 persen, sedangkan 8,03 persen dimiliki oleh PT IndoAgri, dengan perantara Credit Suisse Singapura, sedangkan 35,57 persen saham Lonsum dikuasai oleh publik. Posisi kepemilikan saham tersebut masih tetap sama pada tahun 2009. Di tahun 2010, PT Salim Ivomas menambah kepemilikan sahamnya di Lonsum menjadi 59,5 persen. Sedangkan 40,5 persen saham dimiliki oleh publik.

Pada tahun 2010, dana investasi pensiun dari negara Norwegia telah ditanamkan pada perusahaan London Sumatra tersebut. Nilai pasar investasi norwegia pada Lonsum di akhir tahun 2010 mencapai 31,520,215 NOK (Norwegian Kroner) atau sekitar 49 miliar rupiah. Selain itu, dana pensiun norwegia pada tahun 2010 tersebut juga mengalir kepada pemilik tidak langsung perusahaan tersebut, yaitu Indofood group. Tercatat nilai investasi dana pensiun norwegia pada akhir tahun 2010 di Indofood Sukses makmur dan Indofood CBP Sukses Makmur masing-masing mencapai 187,928,288 NOK (292 miliar rupiah) dan 26,095,055 NOK (40 miliar rupiah).

Struktur manajemen PT PP London Sumatra

Presiden komisaris: Mr Eddy Kusnadi Sariadmatja

Wakil presiden komisaris: Mr. Fransiscus Welirang

Komisaris: Axton Salim, Werianty Setiawan, Hendra Widjaja, Hans Ryan Aditio

Komisaris independen: Rachmat Soebiapradja, Tengku Alwin Aziz, Hans Kartikahadi

Presiden direktur: Mr Benny Tjoeng

Wakil Presiden direktur: Gunadi Sutopo

Direktur: Tjhie Tje Fie, Make Wakeford, Paulus Moleonoto, Joe fly J. Bahroeny, Bryan Dyer, Eddy Hariyanto, Loe Soei Kim, Sonny Lianto

In 2008, Lonsum owned by Salim group or Indofood group through PT Salim Ivomas Pratama with accumulations own direct of shares through Credit Suisse Singapore until 57.12 percent, 8.03 percent of shares Lonsum owned by PT Indo Agri through Credit Suisse Singapore, then 35.57 percent shares of Lonsum owned by public. In 2009, the position of shareholder of Lonsum still same with the previous years. In 2010, PT Salim Ivomas Pratama increase the shares in Lonsum to 59.5 percent, then 40.5 percent share of Lonsum owned by public.

In 2010, the Pension Fund of Norway (Government Pension Fund Global – GPF) have be invested to London Sumatra. The market value of investment Norway to Lonsum in the end of 2010 around 31,520,215 NOK (Norwegian Kroner) or 49 billion rupiah. In addition, in 2010 the Pension Fund of Norway also indirectly flowing to the owner of Lonsum through Indofood Sukser Makmur and Indofood CBP Sukses Makmur, respectively 187,928,288 NOK (292 billion rupiah) and 26,095,055 NOK (40 billion rupiah) .

Structure of Manajemen PT PP London Sumatra

President Commissioners: Mr Eddy Kusnadi Sariadmatja

Vice President Commissioners: Mr. Fransiscus Welirang

Commissioners: Axton Salim, Werianty Setiawan, Hendra Widjaja, Hans Ryan Aditio

Independent Commissioners: Rachmat Soebiapradja, Tengku Alwin Aziz, Hans Kartikahadi

President Director: Mr Benny Tjoeng

Vice President Director: Gunadi Sutopo

Director: Tjhie Tje Fie, Make Wakeford, Paulus Moleonoto, Joe fly J. Bahroeny, Bryan Dyer, Eddy Hariyanto, Loe Soei Kim, Sonny Lianto





Kasus PT Gunung Bayan Pratama Coal

Setengah dari wilayah Kampung Muara Tae didominasi oleh PT Gunung Bayan Pratama Coal, perusahaan tambang batubara. Pada April 2011, Masyarakat adat Dayak Benuaq yang tinggal di Kampung Mancong, Kampung Muara Tae, Kampung Tana Me, Kampung Belusuh, Kampung Muara Nayan, Kampung Perigiq, Kampung Gunung Bayan, Kampung Pentat dan Kampung Lembunah setuju untuk penderitaan dan kesusahan mereka kepada wakil-wakil partai politik di DPRD Kutai Barat di Barongtongkok. Semua kampung tersebut berada disekeliling PT Gunung Bayan Pratama Coal. Pertemuan pertama dilakukan wakil masyarakat, yakni Petrus Asuy didampingi oleh Komite HAM Kalimantan Timur dan Lembaga Bina Benua Puti Jaji pada 29 April 2001 di Kantor Komite Ham bertemu dengan Ketua DPRD Kutai Barat, Drs. Juan Djenau, MA. Pertemuan kedua dilakukan oleh utusan masyarakat penuntut yakni Petrus Asuy, dkk dengan Ketua DPRD Kutai Barat pada 26 Juni 2001. Hasilnya, Ketua DPRD Kutai Barat berjanji akan mempertemukan masyarakat penuntut dengan pihak PT Gunung Bayan Pratama Coal di Gedung DPRD Kutai Barat di Barong Tongkok pada Juli 2001. Hingga sekarang, pertemuan diantara masyarakat dengan PT Gunung Bayan Pratama Coal tidak pernah terjadi.

PT Gunung Bayan Pratama Coal case

The Half of Muara Tae village dominated by PT Gunung Bayan Pratama coal mining company. On April 2001, Dayak Benuaq community that lives in Mancong Village, Muara Tae Village, Tana Mea Village, Belusuh Village, Muara Nayan Village, Perigiq Village, Gunung Bayan Village, Pentat Village, Lembunah Village agreed to bring their distress to the representatives of political parties in Parliament Kutai Barat (DPRD Kutai Barat) in Barongtongkok. All these villages are located around the PT Gunung Bayan Pratama Coal. The first meeting of community representatives (Mr. Petrus Asuy) accompanied by the Human Rights Committee East Kalimantan and Lembaga Bina Benua Puti Jaji on April 29, 2011 in the office of Human Right Committee met with Chairman of DPRD Kutai Barat, Drs. Juan Djenau, MA. The second meeting was held by community representatives (Mr. Petrus Asuy) with Chairman of DPRD Kutai Barat on June 26, 2001. The result, Chairman of DPRD Kutai Barat promised to hold the meeting between community and PT Gunung Bayan Pratama Coal in the building DPRD Kutai Barat on July 2001. Until today, the meeting between community and PT Gunung Bayan Pratama Coal never happen.

Fakta lapangan yang merugikan masyarakat akibat kehadiran PT Gunung Bayan Pratama Coal

1. Penggusuran Tanah Masyarakat Penggusuran ini dilakukan sejak 1995 sampai Juni 2001. Modus operandi yang digunakan adalah gusur duluan, setelah itu baru diadakan negosiasi disertai penekanan berapa harga tanah yang sudah tergusur tersebut.
2. Penghancuran sumber air minum Utak Sunge Olukng Penggusuran sumber air minum, Utak Sunge Olukng, 4 km dari Dusun Muara Tae menjadi lokasi penambangan. Sumber air ini menjadi sangat penting bagi masyarakat Dayak Benuaq di Muara Tae dan sekitarnya pada musim kemarau, karena menjadi satu-satunya sumber air yang tidak mengalami kekeringan di saat kemarau. Akibat penggusuran sumber air ini, masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih.
3. Pencemaran Sungai Nayan, Air sungainya keruh berwarna kuning, dan kadang kadang berwarna sangat jernih. Namun saat penduduk menggunakan air sungai ini untuk mandi, kulit mereka terasa amat gatal.
4. Pengamanan yang berlebihan dari Aparat Kepolisian, Selama ini sering terjadi keributan antara para pemilik tanah yang nekat memperjuangkan hak-haknya atas tanah tersebut dengan aparat kepolisian yang dijadikan centeng oleh PT. Gunung Bayan Pratama Coal. Kepolisian Sektor Kecamatan Jempang dan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Polda Kaltim, terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengamanan di dalam dan di sekitar lokasi perusahaan PT. Gunung Bayan Pratama Coal. Petrus Asuy, Seorang warga Muara Tae yang masih mempertahankan tanahnya dari penggusuran PT Gunung Bayan Pratama Coal, pada 7 April 2001 melarikan diri dari rumahnya di Muara Tae dari upaya penangkapan oleh Kapolsek Jempang, Letda Noldy Very. C.V NrP: 65040022 tanpa surat perintah penangkapan.
5. Prostitusi dan Perjudian. Sebetulnya sejak awal kehadiran lokalisasi di Camp Baru telah ditolak oleh warga Kampung Mancong dan Muara Tae.

Facts on the ground that is harmful to society due to the presence of PT Gunung Bayan Pratama Coal

1. Community land evictions, eviction was carried out since 1995 until June 2001. Method which used are evicted first, then held negotiations with a new emphasis on what the price of land has been displaced.
2. Destruction of drinking water source, Utak Sunge Olukng, 4 km from Muara Tae village turn in mining location. These water resources become very important for Muara Tae community and surrounding during the dry season, because only Utak Sunge Olukng did not drought during dry season.
3. Pollution of Nayan river, Nayan river becomes cloudy and sometime very clear but when people use Nayan river for bathing, they feels very itchy skin.
4. Excessive security of the police officials, there was a conflict among landowner fight for his rights with police who guard PT Gunung Bayan Pratama Coal. Sub-district Police of Jempang and Muara Pahu, also East Kalimantan regional Police involved in security in and around company location. Petrus Asuy (Muara Tae) who still retain their land from eviction PT Gunung Bayan Pratama Coal, on April 7, 2001, to escape from arrest Sub-district Police chief of Jempang without warrant letter.
5. The prostitution and gambling, since the early presence of location in Camp Baru – Muara Tae has been rejected by Muara Tae and Mancong community, but never notice neither by the company, sub-district or district government. Opening of the gambling which is supported by the security officers.

From activities PT Gunung Bayan Pratama Coal in Muara Tae, many left the mine pit containing the greenish water that can not be utilized by the public and animals. Although PT Gunung Bayan Pratama Coal is owned by the richest people in Indonesia, Low Tuck Kwong, until now the electric in Muara Tae source from PLTD (Village Power Plant) where lit from 18.00-24.00. Source of fuel



Namun penolakan itu tidak pernah diperhatikan baik oleh pihak perusahaan, pemerintah kecamatan dan kabupaten. Telah dibuka tempat perjudian di Camp Baru atau Tembehe yang didukung oleh oknum aparat keamanan

Dari aktivitas PT Gunung Bayan Pratama Coal in Muara Tae, banyak meninggalkan lubang tambang yang berisi air kehijauan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan hewan. Walaupun PT Gunung Bayan Pratama Coal dimiliki oleh satu orang terkaya di Indonesia, Low Tuck Kwong, hingga saat ini listrik di Muara Tae hanya bersumber dari PLTD yang hidup mulai jam 18.00-24.00 wita. Sumber bahan bakarnya berasal dari iuran warga Muara Tae sebesar Rp 80.000/ampere yang dibayarkan setiap bulan. Namun, jika mesin PLTD mengalami gangguan, masyarakat menggunakan mesin Jen-set untuk penerangan rumahnya.

Profil PT Gunung Bayan Pratama Coal

PT. Gunung Bayan Pratama Coal berdiri pada tahun 1998. Perusahaan yang bergerak dalam tambang batubara ini telah beroperasi di Muara Tae, Kalimantan timur sejak tahun 1999. Perusahaan ini mempunyai waktu lama untuk mengeruk tambang di Muara Tae, sebab ijin eksploitasi tambang Gunung Bayan Pratama Coal Blok II, yang berlokasi di Muara tae, berakhir pada 11 Juli 2029.

Perusahaan tambang yang berkantor pusat di Jakarta ini saham kepemilikannya didominasi oleh PT Bayan Resource, melalui PT Metalindo Prosestama. Pemegang saham dominan PT Bayan Resources sampai 2010 adalah Dato' Low Tuck Kwong.

Pada tahun 2008, kepemilikan tak langsung PT Bayan Resource, melalui PT Metalindo Prosestama, terhadap PT Gunung Bayan Pratama Coal mencapai hingga 92.7%. Pada tahun 2009, PT Metalindo Prosestama masih menguasai 92.7% saham dari PT Gunung Bayan. Pada tahun 2010, 92.7% saham PT Gunung bayan masih dimiliki oleh PT Metalindo Prosestama.

20 persen saham PT Bayan resource dikuasai oleh Korea electric power pada tahun 2010. Dana investasi pensiun

derived from dues citizens Muara Tae from Rp 80,000/ampere which paid each month. However, if the diesel engine was down, people use Jen-Set machine for home or light illumination derived from petroleum

Profile of PT Gunung Bayan Pratama Coal

PT Gunung Bayan Pratama Coal was incorporated on 1998. The company engaged in coal mining, has operated in Muara Tae, East Kalimantan since 1999. The company has a long time period for dredge coal in Muara Tae, for exploitation licences of Gunung Bayan Pratama Coal Blok II expire on July 11, 2029.

The coal mining company which have head quarter in Jakarta the shares owned by PT Bayan Resource, through PT Metalindo Prosestama. The dominant shareholder of PT Bayan Resources until 2010 is Dato' Low Tuck Kwong.

In 2008, the indirect ownership PT Bayan Resource, through PT Metalindo Prosestama to PT Gunung Bayan Pratama Coal until 92.7 percent. For 2009 and 2010, the shareholder of PT Gunung Bayan Pratama Coal still owned by PT Metalindo Prosestama.

In 2010, 20 percent shares of PT Bayan Resource controlled by Korea Electric Power. The fund investment from GPGF Norway which flowing to Korea Electric Power for 2010 is 33,403,013 NOK or 51 billion rupiah.

Beside that, PT Bayan Resource have plan will increase the supply of coal to Korea Electric Power from 2 million metrik ton every years then for 2012 become 7 million metrik ton.

Kasus PT Gunung Bayan Pratama Coal

norwegia yang mengalir kepada Korea electric power sampai akhir tahun 2010 mencapai 33, 403, 013 NOK atau Rp 51 miliar (Norwegian Kroner).

Selain itu, PT Bayan Resource berencana akan menambah pasokan batubaranya kepada Korea electric power dari 2 juta metrik per tahun ton pada tahun 2012 menjadi 7 juta metrik ton.

Struktur manajemen PT Gunung Bayan Pratama Coal

Direktur utama: Dato' Low Tuck Kwong:

Direktur: Mr. Eddie Chin, Mr. Engki Wibowo, Ms. Jenny Quantero Mr. Lim Chai Hock

The structure management of PT Gunung Bayan Pratama Coal

Main Director: Dato' Low Tuck Kwong : Main Director

Director: Mr. Eddie Chin, Mr. Engki Wibowo, Ms. Jenny Quantero Mr. Lim Chai Hock





Kasus PT Borneo Surya Mining Jaya

Saat ini, Muara Tae masih memiliki hutan tersisa yang masih sangat bagus kondisinya di Kecamatan Jempang. Daerah hutan berada di daerah hulu anak sungai yang mengalir ke Sungai Mahakam. Namun, saat ini hutannya terancam oleh PT Borneo Surya Mining Jaya sejak November 2010. Masyarakat membuat pondok kecil di dalam hutan mereka (Pondok Jaga Hutan Utak Melinau) sebagai bentuk penolakan dari rencana PT Borneo Surya Mining Jaya untuk mengkonversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Sekitar 8.000 hektar wilayah Muara Tae yang masuk kedalam konsesi PT Borneo Surya Mining Jaya, 11.200 hektar. Hasil pengecekan di Kantor Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Kantor Bappeda di tingkat Kabupaten, PT Borneo Surya Mining Jaya belum memiliki izin usaha perkebunan (IUP). Di lapangan, perusahaan ini telah melakukan aktivitas pembukaan lahan dan pembuatan area pembibitan dengan hanya berdasar pada Izin Lokasi dari Bupati Kutai Barat. Perusahaan juga telah membuat jalan rintisan sepanjang 5 km ke dalam hutan di wilayah Muara Tae; peralatan berat telah tersedia dan siap dioperasikan. Jalan rintisan dibuat menggunakan golok dan chainsaw.

PT Borneo Surya Mining Jaya case

Currently, Muara Tae still has remaining forest with a pretty good condition in the sub district Jempang. Forest area is located in the upstream tributaries that flow into the Mahakam River. However, the forest is currently threatened by PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) since November 2010. Making small camp inside they forest (Pondok Jaga Hutan Utak Melinau) as a form of rejected from plan of PT Borneo Surya Mining Jaya to convert forest become palm oil plantations.

About 8,000 hectare area Muara Tae enter into total concessions PT Borneo Surya Mining Jaya 11,200 hectare. Result checking to Plantation Office, Forestry Office, Regional Planning Board (Bappeda) in the district level, PT Borneo Surya Mining Jaya not yet held permit plantations (Izin Usaha Perkebunan). On the ground, this company has been doing land clearing activities and make nurseries with only a location permit (izin lokasi) from Bupati Kutai Barat. The company also has made stub road (around 5 km) into Forest in Muara Tae; heavy equipment is available and ready to operate. The stub road is made using a machete and chainsaw.

Kasus PT Borneo Surya Mining Jaya

Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Borneo Surya Mining Jaya beroperasi di wilayah desa Muara Tae sejak bulan November tahun 2010. Berdasarkan dari akta notaris pendirian perusahaan tersebut, perusahaan perkebunan sawit ini didirikan pada 8 oktober 2007.

Dalam lima tahun terakhir, perusahaan ini terus berganti-ganti kepemilikan saham. Pada tahun 2007, sekitar 99,9 persen dari 1 juta saham PT Borneo Surya Mining Jaya dimiliki oleh PT Fangionoperkasa sejati, sedangkan 0.1% dari 1 juta saham tersebut dimiliki oleh Wirastuty Fangiono. Pada tahun 2009, PT Fangiono Perkasa Sejati menjual 99,9 persen ribu lembar sahamnya kepada Martias, seorang warga negara asal Indonesia. Wirastuty Fangiono masih memiliki 0,1 persen saham PT Borneo Surya Mining Jaya. Pada tahun 2011, PT Pancasurya agroindo mengakuisisi seluruh anak perusahaan PT Kalimantan Green persada, termasuk PT Borneosurya mining jaya. PT Pancasurya Agroindo merupakan anak perusahaan dari PT First Resources Limited. Taipan dari keluarga Fangiono adalah salah satu pemilik dari PT First Resources Limited ini. Selain itu, pada tahun 2010, dana pensiun norwegia telah diinvestasikan ke PT First Resources Limited. Nilai pasar (market value) dana pensiun norwegia yang mengalir kepada first resource limited pada akhir tahun 2010 mencapai 19,026,144 NOK atau sekitar Rp 29 miliar.

Struktur manajemen PT Borneo Surya Mining Jaya

Direktur: Atan Masri

Komisaris: Citra Gunawan

Palm oil company, PT Borneo Surya Mining Jaya operated in Muara Tae village since November 2010. Base on document of notarial deed for incorporated company, this company incorporated on October 8, 2007.

In the last five years, PT BSMJ continues keep changing the shareholders. In 2007, around 99,9 percent of shares PT BSMJ owned by PT Fangiono Perkasa Sejati, and 0,1 percent owned by Wirastuty Fangiono. In 2009, PT Fangiono Perkasa Sejati sales the 99,9 percent of share PT BSMJ to Martias (The Indonesia citizens), then 0.1 percent of share PT BSMJ owned by Wirastuty Fangiono. In 2011, PT Pancasurya Agroindo acquired all the subsidiary of PT Kalimantan Green Persada, include PT Borneo Surya Mining Jaya. PT Pancasurya Agroindo is subsidiary of PT First Resources Limited. Tycoons of fangiono family is one of the owners PT First Resources Limited. In 2010, Pension Fund of Norway has invested to PT First Resources Limited. The market value of pension fund Norway which flow into First Resources Limited in the end of 2010 around 19,026,144 NOK or 29 billion rupiah

Structure Management of PT Borneo Surya Mining Jaya

Director: Atan Masri

Commissioners: Citra Gunawan





Kasus PT Munte Waniq Jaya Perkasa

PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha kelapa sawit. Perusahaan ini memulai kegiatan bisnisnya sejak tahun 2008. Perusahaan ini mendapatkan ijin lokasi kelapa sawit di Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan timur dengan luas mencapai 11500 hektar. Secara detail, konsesi kelapa sawitnya terletak di Kecamatan Siluq Ngurai, Kampung Ponak, Rikong, Kiyag and Kenyanyan.

Pada tahun 2011, perusahaan tersebut terlibat masalah sengketa lahan dengan warga suku dayak Benuaq yang tinggal dari Muara Tae, Kalimantan timur. Perusahaan itu membulldoser paksa lahan warga untuk pembukaan lahan kelapa sawit.

90 persen saham PT Munte Waniq Jaya Perkasa ini sebelumnya dimiliki oleh Halaman semesta Sdn Bhd, yang berasal dari Malaysia. Namun pada bulan mei 2011, perusahaan grup kelapa sawit dari Malaysia, bernama

PT Munte Waniq Jaya Perkasa Case

PT Munte Waniq Jaya Perkasa is the name of company for palm oil concessions. This company started the business activities since 2008. PT MWJP got the permit locations for palm oil concessions in Kutai Barat District – East Kalimantan with total concessions 11,500 hectare. The detail location, for concessions of PT MWJP is in Siluq Ngurai sub-district, Muara Ponak village, Rikong village, Kiyag village, and Kenyanyan village.

In 2011, PT MWJP involved land tenure conflict with Danyak Benuaq Tribe from Muara Tae Village. The company bulldozed the land communities with forcibly for opening palm oil concessions.

Previously, the 90 percent of shareholder PT MWJP are owned by Halaman Semesta Sdn Bhd from Malaysia. But in May 2011, TSH Resource Berhad, the group company of palm oil from Malaysia, acquired 100 percent of shareholder Halaman Semesta Sdn Bhd. Therefore, 90 percent of shareholder PT MWJP owned by Halaman

Kasus PT Munte Waniq Jaya Perkasa

TSH Resource Berhad, mengakuisisi 100 persen saham dari Halaman semesta Bhd. Oleh karena itu, 90% saham PT Munte Waniq Jaya Perkasa yang dimiliki oleh Halaman Semesta, sekarang dikuasai oleh grup perusahaan TSH Resource Berhad.

TSH sendiri telah menjalankan usaha kelapa sawit di Malaysia sejak tahun 1980. Pada tahun 2003, perusahaan tersebut telah memperluas aktivitas bisnis kelapa sawitnya di Sumatra barat dan Kalimantan. Pada akhir tahun 2010, tabungan lahan dari TSH bertambah menjadi 87,857 hektar. Dari total tabungan lahan tersebut, sebanyak 27,957 hektar lahan telah ditanami kelapa sawit. Selain itu, pada 2010, dana pensiun di Norwegia telah diinvestasikan ke TSH resource berhad sekitar 39,885,458 NOK atau Rp 62 miliar.

Semesta Sdn Bhd, now controlled by TSH Resources Group Company.

Since 1980, TSH Resources Berhad has been running the business of palm oil in Malaysia. In 2003, this group company has been expansions the activities of palm oil to West Sumatra and Kalimantan. In the end of 2010, the total land bank TSH Resource Berhad increased to 87,857 hectare. From the total land bank, 27,957 hectare was planted of palm oil. Beside that, in 2010, the Global Pension Fund Government of Norway has invest to TSH Resource Berhad around 39,885,458 NOK atau sekitar 62 billion rupiah.





Mempertahankan Hutan Adat Tersisa

Masyarakat Muara Tae memiliki beberapa aktivitas di pondok jaga, seperti membuat pembibitan pohon, penanaman pohon, pemetaan area, dan mengidentifikasi keanekaragaman hayati. Aktivitas di pondok jaga sudah dimulai sejak April 2011 hingga sekarang, dan ini telah sukses berhasil menekan aktivitas perusahaan dari hutan yang tersisa di Muara Tae.

Observasi keanekaragaman hayati khususnya penggalan informasi jenis katak di daerah hutan utak melinau desa Muara tae dilakukan pada tahun 2011, ditemukan terdapat 12 jenis yang keseluruhannya berasal dari bangsa anura. Jumlah tersebut sekitar 18 persen dari jumlah keseluruhan amfibi yang terdapat di kalimantan. Seluruh katak yang ditemukan merupakan jenis katak yang umum ditemukan di Indonesia.

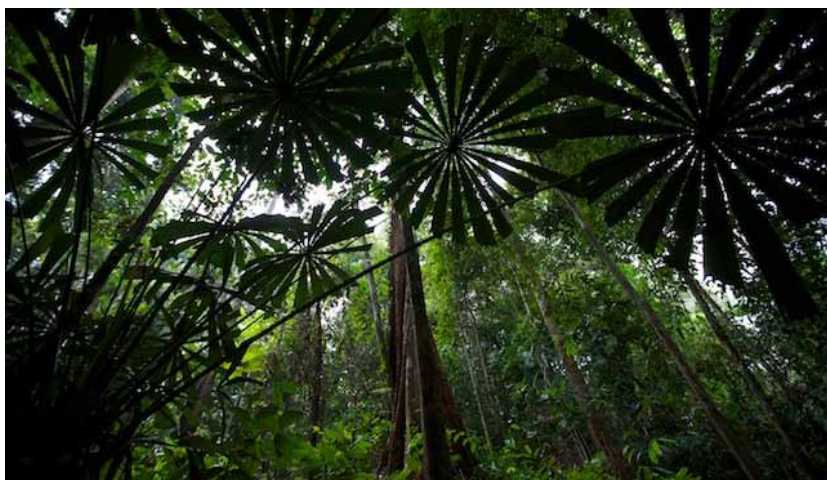
Hutan di Muara Tae, sebelum tahun 1990 dikuasai oleh perusahaan HPH, sehingga hutan yang ada di Muara Tae saat ini merupakan hutan sekunder. Dari hasil analisis vegetasi, ditemukan 40 persen pohon di hutan Muara Tae memiliki diameter diatas 40 cm. Jika hutan terus dijaga tanpa ada kerusakan, hutan di Muara Tae bisa berubah menjadi hutan primer.

Preserve the Remaining Customary Forest

Muara Tae community had some activities in the small camp, likes make tree seedlings, planting tree seedlings, area mapping, and identify of biodiversity. The activities in the small camp was start from April 2011 until now, and this has been successfully suppresses company activities from the Muara Tae remaining forest.

The observation of biodiversity related frog species in the Muara Tae forest is conducted in 2011, founded that overall 12 species from Anura. The amount is about 18 percent of the total number of amphibian found in Kalimantan. The whole frog found a common species found in Indonesia.

Before 1990, Forest in Muara Tae under controlled by logging concessions, so the existing remaining forest is secondary forest. The result of vegetations analysis, found 40 percent tree in Muara Tae Forest has diameter more than 40 cm. If the forest are maintained without any destruction, forest in Muara Tae possible to be a primary forest.



Rekomendasi

Setelah bertahun-tahun beroperasi, perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang tidak memberikan keuntungan seimbang bagi masyarakat setempat, kelestarian ekologis, dan keutuhan social-budaya setempat.

Perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang menjadi contoh yang paling nyata dari kegagalan kebijakan pengelolaan hutan Indonesia pada umumnya dan pembangunan perkebunan skala besar pada khususnya serta aktivitas pertambangan.

Walau demikian pemerintah dan institusi penegak hukum jelas memberi legitimasi yang lebih kepada perusahaan, dengan menegasikan kepentingan masyarakat lokal. Ini menunjukkan betapa tidak setaranya posisi penduduk local jika dibandingkan dengan perusahaan transnasional di hadapan sistem hukum dan pemerintah Indonesia

Recommendations

After years of operations, the palm oil plantations and mining company have not offered equal benefit to the communities, the ecological conservation, and the social and cultural integrity surrounding the sites.

Palm oil plantations and mining company are obvious examples of the failure of the policy of Indonesia forest management, and especially, of the development of large-scale palm oil plantations and mining activities.

However, the local government, along with other law enforcing institutions, gave more legitimacy to company, and neglected local community interest. This represent unequal treatment of the local people and transnational companies in Indonesia law and governmental system.



Flow of Pension Fund Norway (GPFNG) Invesment in Muara Tae Area - East Kalimantan
Aliran tujuan dana investasi pensiun norwegia

Nama Perusahaan	Hubungan	Relation	Market value (NOK)	IDR
Indofood Sukses Makmur	Perusahaan ini merupakan bagian dari Indofood grup. Indofood group merupakan pemilik tak langsung dari PP London Sumatra	This company is part of Indofood group. Indofood group is the indirect owner PP London Sumatra	187,928,288	292.407.000.000,00
Indofood CBP Sukses Makmur	Perusahaan ini merupakan bagian dari Indofood grup. Indofood group merupakan pemilik tak langsung dari PP London Sumatra	This company is part of Indofood group. Indofood group is the indirect owner PP London Sumatra	26,095,055	40.602.700.000,00
PP London Sumatra	Perusahaan ini mempunyai konsesi yang beroperasi di Muara tae.	This company have concessions which operate in Muara Tae	31,520,215	49.043.900.000,00
Korean Electric Power	Perusahaan ini merupakan pemegang saham dari PT Bayan Resource. PT Bayan Resource merupakan pemilik tak langsung dari PT Gunung Bayan Pratama Coal	This company is shareholder of PT Bayan Resource. PT Bayan Resource is the indirect owner PT Gunung Bayan Pratama Coal	33,403,013	55.973.500.000,00
First Resource Ltd	Perusahaan ini merupakan pemilik dari PT Borneo Surya Mining Jaya pada tahun 2011. Telah dideteksi aliran dana norwegia yang masuk ke First resource Ltd berdasarkan laporan GPFNG per akhir tahun 2010.	This company is owner of PT Borneo Surya Mining Jaya on 2011. Norway fund has detected flow to First Resource Ltd base on report GPFNG on the end 2010.	19,026,144	29.603.800.000,00
TSH Resources Bhd	Perusahaan ini merupakan pemilik dari PT Munte Waniq Jaya Perkasa pada tahun 2011. Telah dideteksi aliran dana Pension Fund Norwegia yang masuk ke TSH Resources Bhd berdasarkan laporan GPFNG per akhir tahun 2010.	This company is owner of PT Munte Waniq Jaya Perkasa on 2011. The Pension Fund Norway has detected flow to TSH Resources bhd on the end 2010.	39,885,458	62.059.900.000,00

Source: GPFNG holding equities at 31 December 2010

List of amphibians found in Muara Tae Forest - East Kalimantan

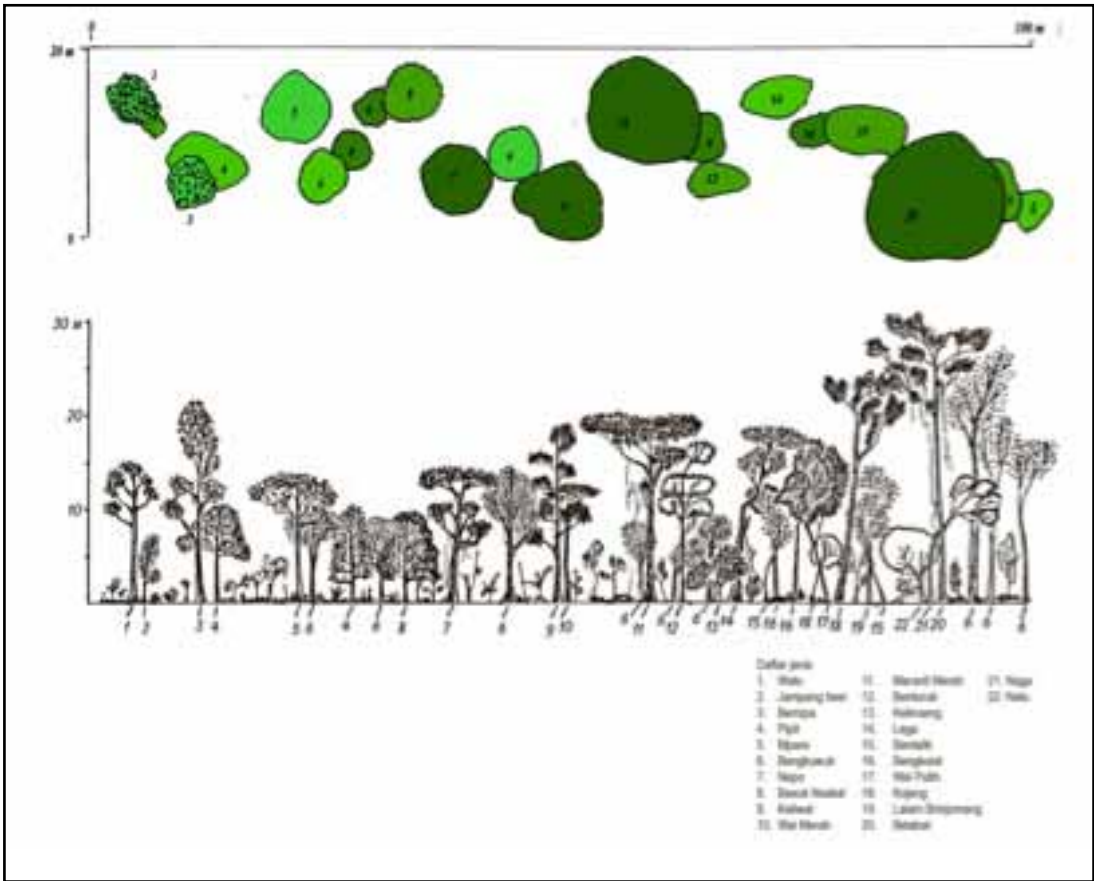
Berikut ini adalah daftar jenis amfibi yang terdapat di sekitar hutan utak melinau desa Muara Tae kalimantan timur

No	Famili	Genus	Jenis
1	Megophryidae	<i>Megophrys</i>	<i>M. nasuta</i>
2	Bufonidae	<i>Bufo</i>	<i>B. biforcatus</i>
3	Bufonidae	<i>Bufo</i>	<i>B. melanostitus</i>
4	Bufonidae	<i>Bufo</i>	<i>B. asper</i>
5	Ranidae	<i>Rana</i>	<i>R. baramica</i>
6	Ranidae	<i>Rana</i>	<i>R. signata</i>
7	Ranidae	<i>Limnonectes</i>	<i>L. kuhlii</i>
8	Ranidae	<i>Limnonectes</i>	<i>L. malesianus</i>
9	Ranidae	<i>Fejervaria</i>	<i>F. limnocharis</i>
10	Ranidae	<i>Fejervaria</i>	<i>F. cancrivora</i>
11	Ranidae	<i>Rana</i>	<i>R. paramacrodon</i>
12	Ranidae	<i>Rana</i>	<i>R. laticeps</i>

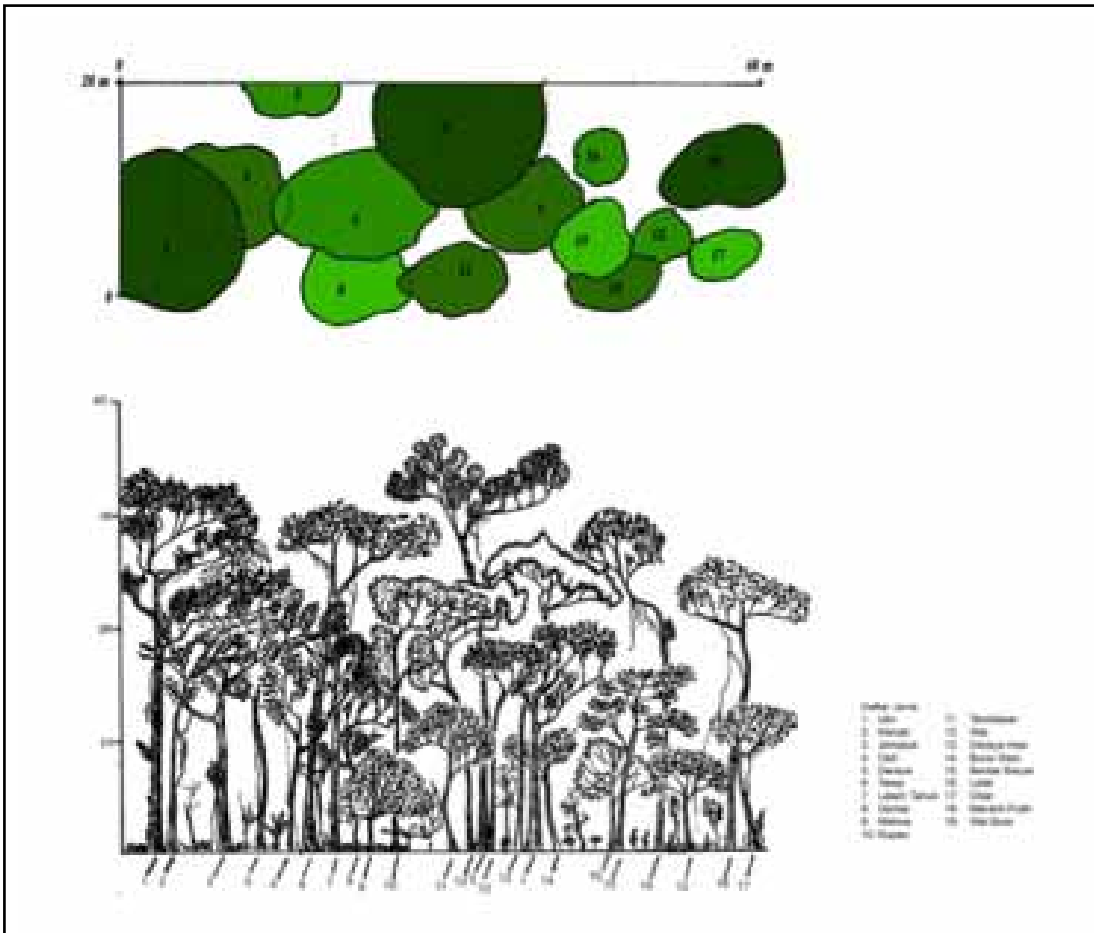
The result identification of herbarium Hasil identifikasi herbarium

No. Coll.	Local Name	Family	Genus & Specis
1	Bentar biayak	Myrtaceae	<i>Syzygium sp.</i>
2	Kemuncik	Myrtaceae	<i>Rhodamnia cinerea Jack.</i>
3	Bernipa	Rubiaceae	<i>Tricalysia singularis K.Schum.</i>
4	Bencabai marau	Euphorbiaceae	<i>Aporosa sp.</i>
5	Keliwat	Euphorbiaceae	<i>Aporosa nervosa Hook.f.</i>
6	Berenjamo	Melastomataceae	<i>Pternandra rostrata (Cogn.) M.P. Nayar</i>
7	Mpare	Ulmaceae	<i>Gironniera nervosa Planch.</i>
8	Pesa	Fabacea	<i>Millettia sericea (Vent.) Winghat. & Arnott.</i>
9	Medak	Lauraceae	<i>Litsea noronhae Blume</i>
10	Ayau Sabe	Lauraceae	<i>Litsea firma Hook.f.</i>
11	Nanjang	Euphorbiaceae	<i>Macaranga motleyana Muell. Arg.</i>
12	Natu	Sapotaceae	<i>Palaquium gutta Burck.</i>
13	Lalam tanuk	Lauraceae	<i>Phoebe grandis (Nees) Merr.</i>
14	Pasilosok	Euphorbiaceae	<i>Baccaurea racemosa Muell. Arg.</i>
15	Medang merua	Lauraceae	<i>Beilschmiedia madang Blume</i>
16	Berempayang	Sterculiaceae	<i>Scaphium macropodum Beumee ex K.Heyne</i>
17	Nepo	Ixonanthaceae	<i>Ixonanthes petiolaris Blume</i>
18	Benuang rangka	Anisophylleaceae	<i>Anisophyllea disticha Baillon</i>
19	Benturuk	Moraceae	<i>Artocarpus odoratissima Blanco</i>
20	Deraya rangkap	Myristicaceae	<i>Knema galeata J. Sinclair</i>
21	Engkebor	Euphorbiaceae	<i>Endospermum diadenum (Miq.) Airy Shaw</i>
22	Asam kandis	Clusiaceae	<i>Garcinia parvifolia Miq.</i>
23	Deraya mea	Myrtaceae	<i>Rhodamnia cinerea Jack.</i>
24	Somput	Annonaceae	<i>Goniothalamus macrophyllus Hook.f. & Thomson</i>

Picture of Forest Profile in Muara Tae



Picture of Forest Profile in Muara Tae



References/Referensi

- Annual Report PT Bayan Resources Tbk, 2008, link: http://www.bayan.com.sg/dlw/annual/Annual%20Report%202008_BYAN.pdf
- Annual Report PT Bayan Resources Tbk, 2009, link : <http://www.bayan.com.sg/dlw/annual/AR%20BAYAN%2009.pdf>
- Annual Report PT Bayan Resources Tbk, 2010, link:http://www.bayan.com.sg/dlw/annual/AR_Byan_2010.pdf
- Annual Report First Resources Limited 2008, link:http://www.first-resources.com/pdf/annual-report2008_full.pdf
- Annual Report Firest Resources Limited 2009, link:http://www.first-resources.com/pdf/annual-report2009_full.pdf
- Annual Report First Resources Limited 2010, link: <http://www.first-resources.com/pdf/annual-report-2010.pdf>
- Annual Report PT PP London Sumatra 2008, link http://www.londonsumatra.com/uploads/download/dl_47_idar_lonsum.pdf
- Annual Report PT PP London Sumatra 2009, link: http://www.londonsumatra.com/uploads/download/dl_47_enLonsum_AR09_with_Financial_Statement_1.pdf
- Annual Report PT PP London Sumatra 2010 http://www.londonsumatra.com/uploads/download/dl_47_enAnnual_Report_2010_Lonsum_web_full_version.pdf
- Completion of Acquisition of PT Kalimantan Green Persada and Subsidiaries, April 29, 2011, link:<http://www.first-resources.com/UploadPDF/Pdf168.pdf>
- Document of Notarial deed for incorporation PT Borneo Surya Mining Jaya, October 8, 2007
- GPFG (Government Pension Fund Global), holding equities at 31 December 2010, link: http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Statens%20pensjonsfond/2011/aksjer_2010.pdf
- RHB Research Institute Sdn Bhd - TSH Resources, Banking On Its Indonesia Plantations, August 5, 2011 http://www.tsh.com.my/web/images/stories/pdf/RHB_TSH-0711.pdf
- Sisminbakum – Dirtory of Notarial – PT Munte Waniq Jaya Perkasa http://www.sisminbakum.go.id/notaris/pub_notarisdata.php?kode_notaris=000071
- Telapak et al. 2000, 'Planting Disaster, link <http://telapak.gekkovoices.com/publikasi/download/plantingdisaster.pdf>
- Telapak Pers Release - Pemerintah Harus Menghentikan Kegiatan PT Munte Waniq Jaya Perkasa, October 28, 2011 http://www.telapak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=258&catid=26&Itemid=72&lang=id
- TSH Resources Bhd - General Announcement, Mei 13, 2011 <http://announcements.bursamalaysia.com/EDMS%5Cedmswebh.nsf/LsvAllByID/482576120041BDAA4825788F0037955C?OpenDocument>
- TSH Resouces Bhd - Explanatory Note For Condensed Consolidated Interim Statement For The Financial Quarter Ended 30 June 2011 <http://www.tsh.com.my/web/images/stories/pdf/TSH-explanatory%20notes-Q2%202011.pdf>

telapak

Merupakan asosiasi dari aktivis LSM, praktisi bisnis, akademisi, afiliasi media, dan pemimpin masyarakat adat. Telapak bekerja bersama petani dan nelayan untuk menuju Indonesia yang berdaulat, berkerakyatan, dan lestari.

Telapak mampu melakukan berbagai aktivitasnya melalui koperasi, perusahaan berbasis masyarakat dalam percetakan, media massa, pertanian organik, dan pengelolaan sumber daya hutan serta laut secara lestari.

Misi Telapak adalah untuk mempengaruhi kebijakan yang berhubungan dengan konservasi, untuk membangun dan mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat lokal, dan menghentikan kerusakan ekosistem yang merugikan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah dengan sumber daya alam yang kaya.



Alamat:

Jl. Pajajaran No. 54 Bogor 16143

Jawa Barat, Indonesia

Phone : +62 251 8393 245

Fax : +62 251 8393 246

info@telapak.org

www.telapak.org